

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk di evaluasi, dikritik dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk meningkatkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja itu sendiri telah diterapkan Badan Pelayan Perizinan Terpadu Kota Medan pada tahun 2011. Pendekatan anggaran disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan mengagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung. Kinerja Keuangannya termasuk dalam Kinerja keuangan yang Efektif dimana program atau kegiatannya telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu Pemerintahan Daerah di Sumatera Utara yang diharuskan menyusun laporan keuangan terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan tersebut berpedoman pada ketentuan pokok yang menyangkut pengelolaan keuangan dan otonomi daerah serta peraturan pelaksanaannya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam penerapannya diperkuat oleh peraturan daerah.

Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Dari data yang diperoleh dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan Tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat bahwa tidak ada satupun dari Realisasi Anggaran yang sesuai dengan yang dianggarkan.

**Tabel 1.1**

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
----	-------	---------------	----------------	--------------	---

<b>1</b>	<b>2014</b>	<b>15.258.500.000</b>	<b>16.343.148.811</b>	<b>1.048.648.810</b>	<b>107,11</b>
<b>2</b>	<b>2015</b>	<b>16.658.500.00</b>	<b>17.983.261.486</b>	<b>1.324.761.486</b>	<b>107,95</b>

**Sumber : Pemerintah Kota Medan**

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pada Pemerintahan Kota Medan belum sesuai dengan target yang direncanakan oleh pemerintah karena terdapat selisih antara anggaran dan realisasi. Ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga perencanaan ditetapkan pemerintah terdapat indikasi program atau kegiatan

Dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di daerah telah dilakukan reformasi penganggaran dengan menerapkan 3 pendekatan yaitu :

### **1. Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah**

Atau sering juga disebut dengan *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF). Pendekatan ini menuntut kita menyusun anggaran untuk 2 tahun anggaran berturut-turut, yaitu tahun anggaran bersangkutan, dan rencana anggaran untyk tahun berikutnya.

### **2. Penganggaran Terpadu**

Pendekatan ini menyatukan anggaran baik yang sifatnya mengikat (dulu dikenal dengan istilah anggaran rutin) maupun anggaran yang tidak mengikat (dulu dikenal dengan istilah anggaran pembangunan) yang sebelumnya dilakukan secara terpisah. Pendekatan ini memaksa instansi pemerintah untuk memandang perencanaan dan pengangguran secara utuh agar dapat menjalankan fungsinya secara baik dan benar.

### **3. Penganggaran Berbasis Kinerja**

Pendekatan ini mengatakan bahwa besarnya alokasi anggaran didasarkan atas target prestasi yang diusulkan oleh instansi pengusul. Ukuran kinerja untuk program adalah manfaat (*outcome*) sedangkan untuk kegiatan adalah keluaran (*output*). Penganggaran kinerja atau berdasarkan prestasi kerja adalah penganggaran yang menekankan pada orientasi *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) yang memiliki konsekuensi pada mekanisme penyusunan anggaran. Berdasarkan uraian diatas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan permasalahan yaitu: “Apakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan?”

## **1.3 Batasan Masalah**

Mengingatnya banyaknya jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada kota Medan maka penulis hanya memilih satu dari sekian banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut sebagai objek penelitian saat ini.

Adapun batasan masalah dalam tulisan ini adalah satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kota Medan yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan (BPPT)

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, secara umum dan secara khusus kepada:

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi pemerintahan, khususnya bagaimana penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi Pemerintah, sebagai informasi tambahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah setelah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.
3. Bagi Akademis, sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan memberi masukan pada pengembangan akuntansi pemerintahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Anggaran**

Setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda, dan cara yang berbeda-beda pula. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Pengertian Anggaran menurut Darsono dan Ari Purwanti (2010) :

- 1. Anggaran dapat berupa anggaran fisik dan anggaran keuangan. Anggaran lazim disebut rencana kerja yang dituangkan secara tertulis dalm bentuk angka-angka keuangan, lazim disebut anggaran formal.**
- 2. Anggaran lazim disebut *perencanaan dan pengendalian laba*, yaitu proses yang ditunjukkan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian secara efektif.**

3. **Anggaran ialah suatu perencanaan laba strategis jangka panjang, suatu perencanaan taktis laba jangka pendek, suatu sistem akuntansi berdasarkan tanggung jawab suatu penggunaan prinsip pengecualian yang berkesinambungan berdasarkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.**<sup>1</sup>

Sedangkan Anggaran menurut Indra Bastian (2010) :

**“Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai alat pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan Pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang”.**<sup>2</sup>

Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana financial yang menyatakan hal-hal berikut:

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.

Anggaran yang tidak efektif pada kinerja dapat mengagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja yang secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga akan mencapai keberhasilan yang baik di masa yang akan datang.

---

<sup>1</sup> Darsono dan Ari Purwanti, **Penganggaran Perusahaan: Teknik Mengetahui dan Memahami Penyajian Anggaran Perusahaan Sebagai Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Aktivitas Bisnis**, Edisi Kedua: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hal.2

<sup>2</sup> Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Edisi ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, hal.191

Menurut Indra Bastian, fungsi Anggaran adalah sebagai berikut :

- 1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan rencana kerja**
- 2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang dilaksanakan di masa mendatang.**
- 3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan.**
- 4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.**
- 5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi.**
- 6. Anggaran merupakan instrument politik.**
- 7. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiscal.<sup>3</sup>**

Adapun jenis-jenis anggaran secara garis besar, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Anggaran Operasional dan anggaran modal (*current vs capital budgets*)

Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu 1 tahun. Anggaran operasional ini sering dikelompokkan sebagai Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*), yaitu jenis Pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset.

Anggaran modal (*capital budget*) menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya.

---

<sup>3</sup>Loc.cit

Belanja modal adalah Pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor public, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharannya.

## 2. Anggaran berdasarkan pengesahan (*tentative enacted budgets*)

Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentative dan anggaran *enacted*. Anggaran tentative adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislative karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, anggaran *enacted* adalah anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislative.

## 3. Anggaran dana umum dan anggaran dana khusus (*general vs special budgets*)

Dalam pemerintahannya, kekayaan Negara (dana) dibagi menjadi dana umum dan dana khusus. Dana Umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan dana khusus dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya *Debt Service Fund* yang digunakan khusus untuk pembayaran utang. Anggaran untuk dana umum disebut anggaran dana umum dan anggaran dana khusus disebut anggaran dana khusus.

## 4. Anggaran tetap vs anggaran fleksibel (*fixed vs flexible budget*)

Dalam anggaran tetap apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel, harga barang/jasa per unit telah ditetapkan. Namun,

jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.

#### 5. Anggaran eksekutif dan anggaran legislative (*executive vs legislative budget*)

Berdasarkan penyusunannya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran eksekutif, yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah, serta anggaran legislative, yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selain itu, ada juga disebut anggaran bersama, yaitu anggaran yang disusun secara bersama-sama antara lembaga legislative dan lembaga eksekutif. Sementara itu, sebuah anggaran yang disusun oleh suatu komite khusus disebut anggaran komite.

Pembuatan anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. Pada organisasi sektor public, pembuatan anggaran umum melewati 5 tahapan.

##### **1. Persiapan (*preparation*)**

Pada tahap ini, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian, setiap unit di pemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah di-*review* dan diadakan dengar pendapat ke semua unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan.

##### **2. Persetujuan lembaga legislative (*legislative enactment*)**

Anggaran diajukan ke lembaga legislative untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislative (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut.

Selain itu, akan juga diadakan dengar pendapat (*public hearing*) sebelum nantinya lembaga legislative menyetujui atau menolaknya.

### **3. Administrasi (*Administration*)**

Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai, baik pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini, dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.

### **4. Pelaporan (*Reporting*)**

Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.

### **5. Pemeriksaan (*Post-audit*)**

Kemudian, laporan diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.

## **2.2. Anggaran Berbasis kinerja**

Pengertian anggaran berbasis kinerja menurut Indra Bastian (2010)

**“Anggaran berbasis kinerja adalah system penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi serta rencana<sup>4</sup> strategis organisasi”.**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah suatu aktivitas penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja yang didasarkan program-program yang dilaksanakan agar mencapai suatu anggaran yang baik.

Adapun tujuan anggaran berbasis kinerja adalah:

1. Menunjukkan keterkaitan langsung antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai.
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

Berdasarkan Tujuan dari Anggaran Berbasis Kinerja tersebut maka yang menjadi indikatornya yaitu:

1. Masukan (*Input*) adalah Sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikatornya seperti dana, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan.
2. Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan

---

<sup>4</sup>**Ibid.** hal 202

menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikatornya seperti dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur.

3. Hasil (*Outcome*) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikatornya seperti sasaran program yang telah ditetapkan.
4. Manfaat (*Benefit*) adalah nilai tambah dari suatu hasil yang manfaatnya akan nampak setelah beberapa waktu kemudian. Indikatornya seperti manfaat menunjukkan hal-hal diterapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal.
5. Dampak (*Impact*) adalah Pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikatornya seperti akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian.

Tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Strategi Organisasi
2. Pembuatan Tujuan
3. Penetapan Aktivitas
4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan.

Penjelasan tentang tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja diatas yaitu:

1. Penerapan Strategi Organisasi

Penerapan Strategi adalah sebuah cara pandang yang jauh kedepan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus dapat :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai

- b. Memberikan arah dan focus strategi yang jelas
- c. Memiliki orientasi masa depan
- d. Menumbuhkan seluruh unsur organisasi.

## 2. Pembuatan Tujuan

Pembuatan tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional dimana tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi suatu organisasi.

## 3. Penetapan Aktivitas

Penetapan Aktivitas adalah Sesuatu yang dasar dalam penyusunan anggaran karena dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan.

## 4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Evaluasi Pengambilan Keputusan adalah langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah proses evaluasi dan pengambilan keputusan Karena proses ini dapat dilakukan dengan standar buku yang telah ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat.

Adapun keunggulan dan kelemahan anggaran berbasis kinerja menurut Ika deka Riyasa yaitu :

Keunggulan anggaran berbasis kinerja :

- 1. Penekanan pada dimasukannya deskripsi secara naratif dari setiap aktivitas di setiap anggaran yang diajukan.**
- 2. Anggaran disusun berdasarkan aktivitas, dengan permintaan yang di dukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif.**
- 3. Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan input.**

4. **Anggaran kinerja yang mensyaratkan adanya data-data kinerja kemungkinan legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah yang diminta dalam fungsi dan aktivitas tertentu. Hal tersebut tidak dapat dilakukan kalau data yang ada hanyalah data belanja (object of expenditure). Setelah diputuskan oleh legislative, eksekutif harus menurut dan merevisi anggarannya.**
5. **Menyediakan kepala eksekutif pengendalian yang lebih terhadap bawahannya. Kepala eksekutif hanya melihat berapa banyak yang di belanjakan bawahannya, namun juga menilai kinerja aktivitas menggunakan standar mata uang atau unit aktivitas.**
6. **Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memakai anggaran daripada berapa banyak jumlah anggaran yang terpakai.<sup>5</sup>**

### **2.3. Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 5, tentang Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah

---

<sup>5</sup> <https://ikadekariyasa.wordpress.com/2013/06/07/kebaikan-dan-kelemahan-anggaran-berbasis-kinerja/>

yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh penggunaan Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dan setiap kegiatan dari hasil (*outcome*) dari setiap program untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan system perencanaan strategis, system penganggaran dan system akuntansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dihasilkan suatu laporan keuangan dan kinerja yang terpadu.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan menteri dalam Negri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekang telah diganti menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 200 tentang Pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### **2.3.1 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Chandra Eka Purwanto tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diringkaskan sebagai berikut :

#### **1. Tanggung Jawab (*accountability*)**

**Pertanggungjawaban pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), kepala daerah (orang-orang yang membawahi semua satuan tata usaha) dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting tanggungjawab mencakup :**

- a) Keabsahan, setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu.**
- b) Pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.**

#### **2. Memenuhi kewajiban keuangan**

**Keuangan daerah harus di tata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang)**

#### **3. Kejujuran**

**Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.**

#### **4. Hasil guna dandaya guna**

**Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.**

#### **5. Pengendalian**

**Petugas keuangan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas tercapai, mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana adan sasaran.<sup>6</sup>**

### **2.3.2 Undang-undang Pelaksanaan Keuangan Daerah**

Perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah, dilihat dari aspek historis, dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu Era sebelum otonomi daerah, Era transisi otonomi, Era mulai paskatransisi. Era pra-otonomi daerah merupakan pelaksanaan otonomi ala orde baru mulai tahun 1975-2004, dan era pascatransisi adalah masa setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Pada era reformasi, dalam manajemen keuangan daerah terdapat reformasi pelaksanaan seiring dengan adanya otonomi daerah. Adapun peraturan pelaksanaannya telah dikeluarkan oleh pemerintah

---

<sup>6</sup> <http://chandraekapurwanto.blogspot.co.id/2013/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>

yang mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

Atas dasar pemerintah mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002. PP Nomor 58 Tahun 2005 merupakan pengganti dari PP No.105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang selama ini dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan APBD, pelaksanaan,penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Substansi materi kedua PP dimaksud, memiliki persamaan yang sangat mendasar khususnya landasan filosofis yang mendepankan prinsip efisiensi, efektifitas,transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan perbedaan, dalam pengaturan yang baru dilandasi pemikiran yang lebih mempertegas dan menjelaskan pengelolaan keuangan daerah,system dan prosedur serta kebijakan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian di bidang penatusahaan,akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Tujuan dikeluarkannya PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah agar pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu Nomor 24 yang merupakan panduan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang standar,bagaimana perlakuan akuntansi, serta kebijakan akuntansi.

### **2.3.3 Kinerja keuangan berdasarkan LAKIP**

Berdasarkan instruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ada kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan melaporkan penskemaan strategi tentang program-program utama yang akan dicapai 1-5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dan jajarannya. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan fungsi instansi tersebut sama sekali tidak menyinggung mengenai peran laporan keuangan instansi yang seharusnya menjadi dasar penyusunan LAKIP, padahal seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah berpusat pada keuangan atau pendanaan.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari pusat, pemerintah daerah atau kota. Adapun penanggung jawab penyusunan LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan bersama tim harus mempertahankan. Selain itu, penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara objektif dan transparan. Disamping itu, perlu diperhatikan prinsip-prinsip lain:

1. Prinsip pertanggungjawaban (adanya *responsibility center*), sehingga lingkupannya jelas. Hal-hal yang (*controllable*) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti pembaca laporan.
2. Prinsip pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan.
3. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar pada biaya penyusunan.

Isi dari LAKIP adalah uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama instansi

pemerintah. Selain itu perlu dimasukkan juga beberapa aspek pendukung meliputi uraian pertanggungjawaban mengenai:

- a) Aspek keuangan
- b) Aspek sumber daya
- c) Aspek sarana dan prasarana
- d) Metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas instansi.

Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah. Penyeragaman ini paling tidak dapat mengurangi perbedaan cara penyajian yang cenderung menjauhkan pemenuhan persyaratan minimal akan informasi yang seharusnya dimuat dalam LAKIP. Penyeragaman juga dimaksudkan untuk pelaporan yang bersifat rutin, sehingga perbandingan atau evaluasi dapat dilakukan secara memadai.

#### **2.4 Pengukuran Kinerja**

Dalam ruang lingkup sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja yang dimana untuk menilai prestasi organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan public yang berkualitas. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang public tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pengukuran kinerja pelayanan sektor publik adalah factor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor public. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan public yang lebih tepat sasaran.

Sedangkan menurut Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti (2014)

**“Pengukuran kinerja adalah digunakan untuk instrument yang digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya”<sup>7</sup>**

Menurut Mulyadi Kinerja adalah :

**“Kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategic yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan”<sup>8</sup>**

Menurut Mardiasmo:

**“Pengukuran Kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan”<sup>9</sup>**

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat atau cara yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga

---

<sup>7</sup>Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal.158

<sup>8</sup> Mulyadi, **Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan**, Edisi Ketiga: Salemba Empat, Yogyakarta, 2007, hal.337

<sup>9</sup> Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Keempat: Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hal.121

dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Adapun tujuan diberlakukannya kinerja sektor publik menurut Wiratna Sujarweni yaitu:

- 1. Akan dapat diperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.**
- 2. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.**
- 3. Mewujudkan tanggung jawab publik.**
- 4. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.**
- 5. Mengalokasikan sumber daya.**
- 6. Untuk mengukur kinerja financial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan perencanaan strategi.**
- 7. Pengukuran Kinerja pendorong terciptanya akuntabilitas publik<sup>10</sup>**

Ada beberapa kriteria suatu pengukuran kinerja yaitu :

1. Dikaitkan dengan tujuan strategi dan mengukur apa yang secara organisasi penting dan mendorong kinerja bisnis.
2. Relevan dengan sasaran dan akuntabilitas tim dan individu yang berkepentingan.

---

<sup>10</sup> V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi**, Pustaka Baru Press: Yogyakarta, 2015, hal.107

3. Memfokuskan pada output yang terukur dan penyelesaian tugas dan bagaimana orang bertindak dan bagaimana tingkah laku mereka.
4. Mengindikasikan data yang akan tersedia sebagai dasar pengukuran.
5. Dapat diverifikasik dengan mengusahakan informasi yang akan mengonfirmasikan tingkat seberapa jauh harapan dapat dipenuhi.
6. Menjadi setepat mungkin dalam hubungan dengan maksud pengukuran ketersediaan data.
7. Mengusahakan dasar umpan balik dan tindakan.
8. Bersifat Komperenhensif, mencakup semua aspek kinerja sehingga ukuran tersedia.

#### **2.4.1 Pengertian Value For Money**

Dalam hal ini yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Kota Medan adalah dengan menggunakan pendekatan yang sering dikenal dengan *Value For Money*, yang merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program kegiatan dan organisasi.

Menurut Mardiasmo pengertian *Value For Money* :

**“*Value for Money* adalah inti pengukuran kinerja pada organisasi pemeerintah. Kinerja Pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, ouput, dan outcome secara bersama-sama”.**<sup>11</sup>

Menurut Mardiasmo (2009) dan Mahmudi (2007) dalam buku Akuntansi Sektor Publik, indikator yang dimaksud adalah Ekonomi, Efektifitas dan Efisien.

---

<sup>11</sup>Ibid. hal.127

**”Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (Mardiasmo 2009). Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada dibawah anggaran maka terjadi penghematan, sedangkan sebaliknya, apabila diatas anggaran maka terjadi pemborosan.**

**Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok Bahasa *value for money*. Ukuran efisien mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output (mardiasmo 2007).**

**Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Pengukuran efektifitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitatkan dengan outputnya (*cost of outcome*)”.**<sup>12</sup>

Indikator diatas yang memiliki maksud yaitu Ekonomis, Efisien dan Efektif. Ekonomi berarti sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (*spending less*), yaitu harga yang mendekati pasar. Indikator ekonomi merupakan indikator tentang penggunaan input. Dalam konteks dua jenis input tersebut, keekonomian dapat dianalisis dapat membandingkan input sekunder pada jumlah input primer yang dibutuhkan.

---

<sup>12</sup> Abdul Halim dan Syam Kusufi, **Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi, Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dan Pemerintah Hingga Tempat Ibadah**, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal.132-134

Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas sumber daya (*input*) yang digunakan. Suatu organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya.

Efektifitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektifitas merupakan refleksi *output*, Efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Langkah-langkah dalam pengukuran *Value For Money* :

#### 1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Dimana Indikatornya seperti Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu, mempertimbangkan masukan yang dipergunakan, menghindari pemborosan dan meningkatkan penghematan. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pengukuran ekonomi adalah:

1. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
2. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
3. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

#### 2. Pengukuran Efisien

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar efisiensi suatu organisasi maka semakin efisien suatu organisasi tersebut. Indikatornya seperti Seberapa baik mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan output, semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi .

### 3. Pengukuran Efektifitas

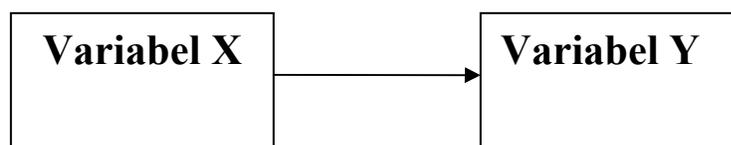
Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikatornya seperti Apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*Cost of outcome*).

### 2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas. Kerangka ini di dapatkan dari ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang di dapatkan dari tinjauan pustaka atau kalau boleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis suatu variabel yang di teliti.

**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Konseptual**



Keterangan : X= Anggaran Berbasis Kinerja

Y= Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

## **2.6 Penelitian terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Syantonius Pasaribu yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah,

Hijrani Putri Lubis telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil analisis dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang.

## **2.7 Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2013) pengertian Hipotesis:

**“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.<sup>13</sup>**

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

---

<sup>13</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**: Edisi Ketujuhbelas: Alfabeta, Bandung, 2013, hal.93

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Medan (Pada BPPT Kota Medan) yang beralamat di jalan Jenderal Besar H.Abdul Haris Nasution No.32 Sumatera Utara, Medan.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif dan Penelitian *AssosiatifKausal*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dari subjek beberapa individu, organisasional, atau perspektif lain. Penelitian *Assosiatif Kausal* adalah penelitian yang bertujuan untuk mengukur suatu hubungan antara variabel riset, atau untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada anggaran berbasis kinerja dan kinerja keuangan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuisisioner/angket. Dimana kuesioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk mendukung penulisan adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer adalah data yang diterima langsung dari sumbernya, baik orang-orang yang telah ditetapkan menjadi informasi yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari tempat penelitian berupa data tertulis seperti sejarah organisasi, visi dan misi organisasi, dan laporan-laporan yang sesuai dengan kebutuhan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dimana data kuantitatif yaitu berupa nilai atau skor berdasarkan jawaban oleh responden tentang pertanyaan atau pernyataan yang telah ada di kuisioner.

### 3.5. Populasi dan Sampel

#### 3.5.1. Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono adalah:

**“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.**<sup>14</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan yang berjumlah 82 orang.

#### 3.5.2. Sampel

---

<sup>14</sup>Ibid. hal.115

Sampel adalah peneliti yang dapat meneliti seluruh populasi atau meneliti sebagian dari elemen populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis sampel yaitu Purposive Sampling. Menurut Jusuf Soewadji purposive sampling adalah :

**“Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti”<sup>15</sup>**

Oleh karena itu, sampel penelitian hanya bisa dipercayakan pada responden yang memang dianggap dapat memenuhi Kriteria sebagai berikut:

1. Pendidikan terakhir Sarjana 1 (S1)
2. Memiliki lama tahun bekerja yang berkisar antara 10-35 tahun
3. Terlibat dalam penyusunan Anggaran

Berdasarkan kriteria diatas maka yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 orang. Maka jumlah responden yang dapat dijadikan sampel dan yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Responden**

<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1.	Kepala badan	1
2.	Kepala bagian TU	1

---

<sup>15</sup> Jusuf Soewadji, **Pengantar Metode Penelitian**, Edisi Asli: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hal.141

3.	Plt. Kepala Sub. Bag umum	1
4.	Staff Plt. Subbag umum	21
5.	Kasubbag Keuangan	1
6.	Staff Keuangan	4
7.	Kasubbag penyusunan program	1
8.	Staff Penyusunan Program	2
9.	Kabid I	1
10.	Staff Kabid I	12
11.	Kabid II	1
12.	Staff Kabid II	20
13.	Kabid III	1
14.	Staff Kabid III	7
15.	Kabid IV	1
16.	Staff Kabid IV	7
<b>Jumlah</b>		<b>82 Orang</b>

Jadi jumlah responden ada 82 orang. Sampel diambil berdasarkan purposive sampling sebanyak 82 orang yang terdiri dengan alasan atau pertimbangan yang mengetahui atau dapat dimengerti mengenai judul skripsi yang dibuat. Kuesioner akan diberikan kepada responden dan akan diterima kembali pada waktu yang akan disepakati oleh responden.

### 3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan peneliti ini, maka perlu diberikan variabel operasional yang akan diteliti. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Anggaran Berbasis Kinerja sementara variabel independennya adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

**Tabel 3.2**

#### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
<b>Anggaran berbasis kinerja (X)</b> yaitu instrument yang	1.Pendanaan dan kinerja.	1. Masukkan (input) adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses

<p>digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan kegiatan terhadap dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.</p>	<p>2.Efisiensi dan transparansi. 3.Fleksibilitas dan akuntabilitas.</p>	<p>untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indicator masukan meliputi dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan.</p> <p>2. Keluaran (output) Adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolak ukur dikaitkan dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur.</p> <p>3. Hasil (Outcome) Adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indicator hasil adalah sasaran program yang telah ditetapkan.</p> <p>4. Manfaat (Benefit) Adalah nilai tambah dari suatu hasil yang manfaatnya akan Nampak setelah beberapa waktu kemudian. Indicator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal.</p> <p>5. Dampak (Impact) Pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indicator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapan waktu kemudian.</p>
<p><b>Kinerja Keuangan (Y)</b> Yaitu kemampuan dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam pendapatan belanja daerah yang baik secara langsung atau tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah</p>	<p>1.Ekonomi  2.Efisiensi</p>	<p>1. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. 2. Mempertimbangkan masukan yang digunakan. 3. Menghindari pemborosan 4. Meningkatkan penghematan 1. Seberapa baik mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk</p>

daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan social masyarakat.	3.Efektifitas	menghasilkan output. 2. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi. 1. Apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya ( <i>cost of outcome</i> ) untuk menguji tingkat kekuatan kemandirian.
--	---------------	--

Setiap item terdiri dari masing-masing variabel dijadikan dasar dalam pembuatan kuisisioner

dimana jawaban diberi skor sebagai berikut:

1. Sangat tidak setuju (STS) : Diberi skor 1
2. Tidak setuju (TS) : Diberi skor 2
3. Netral (N) : Diberi skor 3
4. Setuju (S) : Diberi skor 4
5. Sangat setuju : Diberi skor 5

### 3.7 Metode Analisis Data

#### 3.7.1 Uji Validitas

Sahat Saragih menyatakan Uji Validitas adalah :

**“Uji Validitas dilakukan untuk melihat sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya”<sup>16</sup>**

Uji validitas dapat disampaikan hal-hal pokoknya, sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Sahat Saragih, **Aplikasi SPSS Dalam Statistik Penelitian Pendidikan**, Cetakan Pertama dan Kedua: Perdana Publishing, Medan, 2015, hal.177

1. Uji sebenarnya dilakukan untuk melihat kelayakan butir-butir pertanyaan dalam kuisisioner tersebut dapat mendefinisikan suatu variabel.
2. Daftar pertanyaan pada umumnya untuk mendukung suatu kelompok variabel tertentu.
3. Uji validitas dilakukan setiap butir. Hasilnya dibandingkan dengan  $r_{tabel}$   $df=n-k$  dengan tingkat kesalahan 5%
4. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka butir soal disebut valid.

### **3.7.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuisisioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuisisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten/tidaknya responden terhadap kuisisioner-kuisisioner penelitian.

Uji Reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai *cronbachs alpha*. Jika nilai *cronbachs alpha* lebih besar dari 0,6 maka butir-butir pertanyaan/pernyataan pada masing-masing variabel penelitian tersebut dinyatakan reliable.

## **3.8 Uji Asumsi Klasik**

### **3.8.1 Pengujian Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal.

Terdapat dua metode uji normalitas yaitu sebagai berikut:

- a) Metode grafik yaitu melihat menyebar data pada sumbu diagonal pada grafik *Normal P-plot regression standardized residual*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Metode Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Uji ini digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal. Residual normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

### 3.8.2 Uji Heterokedasitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedasitas. Dan jika varians berbeda maka disebut Heterokedasitas. Uji Heterokedasitas dilakukan dengan melihat grafik.

### 3.9 Pengujian Hipotesis

Menurut Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak pengujian Hipotesis adalah :

**“Pengujian hipotesis adalah mengarahkan hipotesis pada suatu bentuk penyelidikan empiris untuk menetapkan apakah pernyataan hipotesis didukung atau disanggah oleh apa yang diamati peneliti”<sup>17</sup>**

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana.

---

<sup>17</sup>Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Cetakan kedua: Sadia, Medan, 2011, hal.73

Pengertian regresi linear menurut Sugiyono adalah:

**“Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional maupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen”.**<sup>18</sup>

Pengolaan data akan dilakukan dengan alat bantu aplikasi yaitu SPSS. Adapun persamaan umum regresi linear sederhana adalah:

$$Y' = a + bX$$

Dimana:  $Y'$  = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan

$a$  = Harga  $Y$  bila  $X=0$

$b$  = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila  $b$  ( $b+$ ) maka naik, dan bila  $b$  ( $b-$ ) maka terjadi penurunan.

$X$  = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

### 3.9.1 Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai *Adjustment Square (Adjusted  $R^2$ )* untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu anggaran berbasis kinerja mempengaruhi kinerja keuangan. Nilai  $R^2$  mempunyai interval 0 sampai 1. Jika  $R^2$  bernilai bebas (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel

---

<sup>18</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Edisi Ketiga belas: Alfabeta, Bandung, 2013, hal.270

dependen. Sedangkan jika nilai  $R^2$  kecil berarti kemampuan variable bebas dalam menjelaskan variable dependen sangat terbatas.

### 3.9.2 Pengujian Parsial

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variable independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) dan juga membandingkan antara  $t_{\text{hitung}}$  dan  $t_{\text{tabel}}$ .

Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima.
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Sedangkan penolakan atau penerimaan hipotesis dengan membandingkan antara  $t_{\text{hitung}}$  dan  $t_{\text{tabel}}$  dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika  $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$  maka hipotesis diterima.
2. Jika  $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$  maka hipotesis ditolak